

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendalami PPID Provinsi Jawa Tengah dapat berperan dan menjalankan fungsi sebagai bagian pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam mewujudkan KIP sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 dalam uraian berikut :

- a. Peran PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012.

PPID Provinsi dalam menjalankan perannya sesuai dengan pasal 13 dengan 8 poin yang dikategorikan kedalam 2 indikator peran. Peran sebagai pengelola informasi dan sebagai pelayan informasi. PPID Provinsi Jawa Tengah sudah berperan aktif dengan melaksanakan pengelolaan yang mumpuni dalam internal PPID dengan menyediakan informasi melalui pembuatan DIP dan DIK sebelum permohonan informasi dan dilanjutkan uji konsekuensi yang dikelompokkan dalam kategori sektoral hingga pengklasifikasian jenis informasi dan penetapan DIP – DIK. PPID Provinsi sudah berperan aktif sebagai pengelola informasi. PPID Provinsi sebagai pelayan informasi menjalankan pelayanan permohonan informasi pada media yang dimiliki dan memastikan informasi yang sudah

dikelola diterima masyarakat dengan cepat mudah dan akurat, hal ini diukur melalui survei kepuasan pengguna yang menghasilkan IKM di tahun 2023 – 2024 puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga PPID Provinsi berhasil dalam menerapkan peran pelayan informasi.

- b. Fungsi PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012

Fungsi PPID Provinsi dilihat dalam pasal 15 dengan memfokuskan kepada 2 indikator saja yakni dokumentasi arsip dengan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi. PPID Provinsi berfungsi sebagai bagian dari peran pengelola informasi untuk mendokumentasikan tiap pengelolaan informasi, atau dokumentasi arsip. Bentuk dokumentasinya beragam dengan menggunakan penyimpanan dokumen fisik pada loker penyimpanan hingga arsip digital pada *website*, dan adanya komitmen untuk memperbaharui dan pelaksanaan inovasi digitalisasi pada aplikasi terbaru SLIM Jateng. PPID Provinsi berfungsi sebagai bagian dari peran pelayan informasi dengan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi. PPID Provinsi berfungsi sebagai mediator dalam proses keberatan informasi antara pemohon informasi dan badan publik PPID lain sebagai termohon dan berfungsi sebagai termohon ketika kasus keberatan informasi lahir menjadi kasus sengketa.

- c. Peluang dan Kendala PPID Provinsi Jawa Tengah berdasarkan teori *Good Governance*

PPID Provinsi tentu memiliki potensi peluang dalam mengelola dan menjalankan layanan informasi publik. Peluang yang berupa dukungan pimpinan yang meminimalisir intervensi kepentingan tertentu, perolehan prestasi PPID Provinsi, serta kemampuan untuk memberikan layanan yang lebih efisien melalui infrastruktur teknologi yang dimilikinya. Kolaborasi dengan pelaksana juga memberikan bentuk tata kelola sinergitas yang mumpuni. Disisi lain PPID juga menemui beberapa kendala seperti sosialisasi yang kurang menyeluruh bagi masyarakat serta anggaran yang kurang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

4.2 Saran

Keberjalanan PPID Provinsi yang telah menunjukkan kinerja mencukupi dalam penyediaan layanan informasi publik, terdapat beberapa kendala yang masih ditemui dan perlu diperhatikan, sehingga berikut beberapa saran dalam menghadapi kendala – kendala tersebut :

a) Efisiensi Anggaran Sosialisasi

Optimalisasi penggunaan anggaran dengan memaksimalkan program sosialisasi khususnya di daerah Desa Provinsi Jawa Tengah, dengan memanfaatkan media dan sarana prasarana yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi keterbukaan informasi publik.

b) Aksesibilitas Layanan bagi Masyarakat Awam

PPID perlu memperbaharui aksesibilitas layanan informasi supaya lebih ramah bagi pengguna baru yang awam akan teknologi seperti pengguna yang lanjut usia. Penyediaan bentuk konsultasi langsung dan membuat tampilan layanan lebih sederhana membantu masyarakat mengakses informasi menjadi lebih mudah